

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Sektor usaha mikro mendominasi sebagai penopang perekonomian negara dengan total unit usaha pada tahun 2017 mencapai 62.9 juta unit. Pada periode 2017-2018 jumlah unit usaha mikro mengalami perkembangan sebesar 2%, (Tabel 1). Pada tahun 2018, total unit usaha mencapai 55.2 juta unit (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018).

Tabel 1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Unit Usaha Tahun 2017-2018 (unit)

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Perkembangan
	Jumlah	Jumlah	(%)
Total UMKM	62.922.617	64.194.057	2.02
Usaha Mikro	62.106.900	63.350.222	2
Usaha Kecil	757.090	783.132	3.44
Usaha Menengah	58.627	60.702	3.54

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Kedua, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap (PDB) pada tahun 2018 UMKM memegang posisi terbesar yaitu sebesar 57,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara sektoral, aktifitas UMKM ini didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan pada periode 2017-2018 yang dihasilkan oleh sektor UMKM mencapai 5,0%

Tabel 2 Perkembangan Data Usaha Mkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Perkembangan
	Jumlah	Jumlah	(%)
Total UMKM	5.445.564	5.721.148	5.06
Usaha Mikro	2.804.585	2.927.890	4.4
Usaha Kecil	1.272.701	1.355.705	6.52
Usaha Menengah	1.368.277	1.437.551	5.06

Sumber :Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Ketiga, potensinya sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja pada UMKM mencapai 117 juta orang pada tahun 2018, maka dari itu UMKM sangat diharapkan untuk dapat terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini berarti UMKM juga memiliki peranan yang strategis dalam upaya pemerintah selama ini untuk memerangi kemiskinan di dalam negeri. Pada periode 2017-2018, jumlah tenaga kerja pada UMKM secara keseluruhan meningkat sebesar 0,47%.

Tabel 3 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Tenaga Kerja tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Perkembangan
	Jumlah	Jumlah	(%)
Total UMKM	116.431.224	116.978.631	0,47
Usaha Mikro	105.509.631	107.376.540	1.77
Usaha Kecil	6.546.742	5.831.256	-10.93
Usaha Menengah	4.374.851	3.770.835	-13.81
Usaha Besar	3.828.953	3.619.507	-5.47

Sumber :Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Sama halnya dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut data perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan :

Tabel 4 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 – 2018

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Total UMKM	225.242	229.644	248.664
Nilai Investasi (miliar)	191.8	287.8	303.3

Sumber :Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan Madura juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten bangkalan Madura dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan mencapai 225.242 dengan nilai investasi sebesar 191.8 miliar. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 dengan total UMKM sebanyak 248.664 dengan nilai investasi sebesar 303.3 miliar.

Perkembangan sektor UKM di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal. Menurut Sumo Diningrat (2007) salah satu ciri utama UMKM adalah tidak memisahkan kedudukan pemilik dan manajerial serta *unbankable* atau mengandalkan modal sendiri. Kredit usaha kecil merupakan salah satu solusi UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Bank sebagai lembaga yang bertujuan menyediakan dana bagi masyarakat ternyata tidak mampu menjangkau lapisan semua masyarakat. Sumber dana pihak ketiga bank adalah simpanan berjangka, tabungan, dan giro. Dana pihak ketiga digunakan untuk

pembiayaan tetapi kenyataan nya masih banyak usaha mikro, kecil maupun menengah yang belum mendapat kredit dari bank karena terkendala agunan.

Pola pembiayaan dengan sistem syariah memiliki potensi untuk mengatasi pemodalannya UMKM. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk akomodasi pola pembiayaan dengan sistem syariah di Indonesia. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah salah satu contoh LKMS yang diharapkan menjadi solusi permodalan bagi UMKM yang tidak memiliki aset untuk digunakan sebagai agunan administrasi pinjaman terhadap bank. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang mengandalkan modal sendiri. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah) pola pembiayaan dengan sistem syariah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mendukung kegiatan usaha mikro rakyat bawah dan kecil, yang berlandaskan syariat Islam. BMT terdiri dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Selain produk simpan pinjam, BMT juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil seperti peternakan, perikanan, toko serba ada, leveransir, ekspor impor dan sebagainya. Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebagian besar berbadan hukum koperasi. Oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995, BMT tidak mempunyai peluang untuk menyalurkan pinjaman kepada non anggota.

Prinsip dalam hal pembiayaan syariah pada BMT dilihat sesuai dengan karakteristik UMKM, dan pola pembiayaan yang ditawarkan BMT diharapkan

mampu untuk menghapuskan ketakutan UMKM dalam hal tingkat Bunga dan resiko lainnya sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa ada kendala. Salah satu bentuk Lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pembentukan BMT ini merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal di perbankan yang membutuhkan agunan untuk jaminan pinjaman. BMT ini diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang dibentuk dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di desa.

Kehadiran BMT di Kabupaten Bangkalan bermula dari semangat yang sama untuk memajukan perekonomian daerah yang dasarnya adalah ekonomi masyarakat negeri. BMT disini disarankan cocok untuk masyarakat Kabupaten Bangkalan karena memiliki konsep islam yang sesuai dengan akidah umat yang mayoritas. Dengan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam proses pinjam meminjam maka diharapkan dapat menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Kondisi lembaga keuangan di Kabupaten Bangkalan begitu pesat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang telah berdiri seperti lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah maupun yang konvensional.

Pada penelitian Assidiki (2018) yang dilakukan di Bank BTPN Cabang Bangkalan yang memfokuskan studi pada produk bisnis kredit usaha mikro dan kecil, dimana kredit yang diberikan kepada para nasabah yang ingin melakukan usaha namun tidak memiliki cukup modal untuk melakukan usaha tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal yang dimiliki telah cukup memadai hanya saja terdapat kendala pada Bank BTPN

Cabang Bangkalan yaitu tidak dapat menekan nilai NPL (*Non Performing Loan*) dibawah batas maksimal 5%.

BMT di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang telah berdiri tahun 2010 menyatakan bahwa BMT mempunyai andil yang sangat besar bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, dan BMT di kecamatan Galis kabupaten Bangkalan sangat dirasakan oleh nasabahnya. Terutama dalam membantu pembiayaan, modal usaha dan meningkatkan penghasilan. Salah satunya meningkatnya nasabah setiap tahunnya tidak terlepas dari penawaran produk-produk yang diberikan oleh pihak BMT tersebut (Latifah, 2019).

Keadaan serupa juga terjadi di BMT Tanah Merah kabupaten Bangkalan telah berdiri sejak tahun 2006, dan BMT tersebut sangat membantu masyarakat Tanah Merah dalam kegiatan ekonomi, dikarenakan Kecamatan Tanah Merah masih belum terdapat bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa, peran lembaga keuangan mikro syariah di Bangkalan sangat mendukung untuk kelancaran transaksi ekonomi (Kamalia, 2017).

Penelitian ini difokuskan pada BMT Al-azhary Nusantara Cabang Tanjung Bumi yang merupakan cabang pembantu yang telah berdiri pada tahun 2017 yang mana lokasinya berada di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Tanjung Bumi merupakan daerah sentra produksi batik terbesar di Kabupaten Bangkalan yang mempunyai ciri khas tersendiri dan terdiri dari beberapa desa penghasil batik yaitu Desa Tanjung Bumi, Desa Telaga Biru, Desa Macajeh, dan sentra kerajinan kampung batik di Desa Paseseh. Desa wisata ini memang sudah dikenal sebagai desa penghasil batik dan tempat berkumpulnya pengrajin juga pedagang batik sejak puluhan tahun yang lalu. Sepanjang jalan di desa ini berjejer rumah-rumah penduduk

yang memiliki usaha pembuatan maupun menjual batik sehingga disebut rumah batik sehingga dianggap berpotensi sebagai objek wisata belanja, budaya, dan edukasi (Dewanty, 2017). Sentra produksi batik Tanjung Bumi merupakan salah satu unit usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki Kecamatan Tanjung Bumi dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sekitar.

BMT Al-Azhary merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi, ada juga beberapa lembaga keuangan bank tetapi lembaga keuangan bank syariah masih belum ada di Kecamatan Tanjung Bumi. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan alternatif khususnya kepada masyarakat atau UMKM yang membutuhkan pelayanan jasa bank dengan pola syariah bebas bunga, bebas riba dan berbasis tolong menolong. Meskipun kontribusi yang diberikan BMT tergolong kecil jika diukur dari perekonomian nasional tetapi jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan terfokus pada sektor perekonomian kerakyatan.

Sama halnya dengan peranan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT Al-Azhary Nusantara juga menjadi jalan keluar bagi UMKM dalam mengatasi masalah permodalan. BMT Al-Azhary Nusantara juga menerapkan pola pembiayaan syariah bebas bunga, bebas riba, dan berbasis tolong menolong. Sehingga dengan jumlah UMKM yang salah satunya dengan adanya sentra batik di kawasan Tanjung Bumi BMT Al-Azhary Nusantara dapat digunakan oleh para pelaku UMKM untuk mengatasi permodalan, ditambah dengan akses yang dekat dengan wilayah usaha. Sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan pinjaman usaha dengan sistem syariah di BMT Al-Azhari Nusantara.

Selain itu latar belakang adanya BMT Al-Azhary Nusantara Cabang Tanjung Bumi karena melihat kondisi riil masyarakat dari segi ekonomi yang masih belum

layak dan mapan apalagi bagi para pelaku usaha masih banyak yang terjerat rentenir akibat tidak adanya lembaga yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kondisi lain yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Tujuan dibentuknya BMT Al-Azhary dibentuk dengan upaya memberdayakan masyarakat melalui simpanan dan pinjaman serta kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu BMT Al-Azhary Cabang Tanjung Bumi menjadi salah satu objek penting dalam pembiayaan mikro syariah di Kecamatan Tanjung Bumi. Melihat pentingnya peran BMT Al-Azhary untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu dikaji mengenai akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil studi di BMT Al-Azhary Nusantara Cabang Tanjung Bumi dengan judul **“AKSES UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH (STUDI BMT AL AZHARY NUSANTARA CABANG TANJUNG BUMI BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akses UMKM terhadap layanan pembiayaan pada lembaga keuangan ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM memiliki akses terhadap pembiayaan syariah BMT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan akses UMKM terhadap layanan pembiayaan pada lembaga keuangan.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan syariah BMT.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna pada dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu ekonomi pembangunan. Khususnya mengenai informasi pembiayaan syariah BMT Al-Azhary Nusantara Cabang Tanjung Bumi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah di BMT Al-Azhary Nusantara Cabang Tanjung Bumi dan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak BMT Al-Azhary Nusantara supaya dalam operasional dan kinerjanya dapat semakin membaik.